

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas suatu bangsa dan sebagai sarana dalam membangun watak bangsa. Pendidikan sangat diperlukan sebagai suatu kebutuhan dasar masyarakat yang ingin maju. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 bahwa pendidikan bertujuan untuk:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas suatu bangsa maka dibutuhkan pendidikan yang bermutu dalam upaya pemenuhan tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas suatu bangsa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab VI mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bahwa salah satu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga formal yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekolah merupakan salah satu bentuk lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.

Untuk memenuhi tujuan pendidikan, maka sekolah perlu meningkatkan kapasitas manajemen sekolahnya. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi para pelanggan pendidikan. Kapasitas manajemen sekolah yang

rendah akan mengakibatkan mutu pendidikan yang rendah pula. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Triatna (2015, hlm. 9), bahwa “keberhasilan dalam mencapai mutu penyelenggaraan pendidikan memiliki ketergantungan pada sejauh mana kapasitas sekolah dikembangkan untuk merespons fungsi-fungsi dan masalah yang dihadapi sekolah atau secara sederhana seberapa besar kemampuan sekolah untuk terus belajar”.

Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk sesuai dengan standar atau belum. Mutu Pendidikan di Indonesia mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Indonesia, maka dari itu SNP berisi ketentuan mengenai delapan standar yang menjadi kriteria kebermutuan pendidikan secara nasional.

Salah satu permasalahan mutu pendidikan dapat terkait dengan pemenuhan sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk mengukur apakah sekolah telah dapat memenuhi SNP atau belum maka perlu diadakannya evaluasi yang dilakukan sekolah. Untuk itu, evaluasi diperlukan oleh sekolah dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan saat ini untuk perkiraan strategi untuk beberapa tahun ke depan, serta mengevaluasi program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Sukanintyas, dkk., 2016, hlm. 363).

Standar Nasional Pendidikan dapat dicapai secara bertahap melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dalam pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa “Standar pelayanan minimal pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.” Selain itu juga dalam pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu upaya dalam mencapai SPM pendidikan, yaitu sebagai berikut:

Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pada praktiknya penyelenggaraan pendidikan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi standar mutu yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada hasil evaluasi capaian SPM untuk Sekolah Dasar di Kota Bandung dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014. Data menunjukkan bahwa penetapan target untuk sekolah dasar mencapai SPM sebesar 80% (658 SD), sedangkan hanya 78,66% (645 SD) yang baru mencapai SPM.

Data di atas menunjukkan bahwa sekolah dasar di Kota Bandung belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. Hal tersebut dapat menandakan bahwa kapasitas manajemen sekolah belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

Triatna (2015, hlm. 8) menyebutkan bahwa analisis permasalahan pendidikan ini bertumpu pada sumber daya manusia yang menyelenggarakan pendidikan. Sementara itu, Abeng (dalam [slideplayer.info](#)) menyebutkan juga bahwa dalam implementasi SNP dan SPM secara penuh memerlukan sumber daya yang sangat besar, termasuk kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi.

Sejalan dengan itu pada LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014 disebutkan bahwa pada indikator pemenuhan kualifikasi guru menunjukkan bahwa 22,66% memenuhi SPM dan 77,34% belum memenuhi SPM.

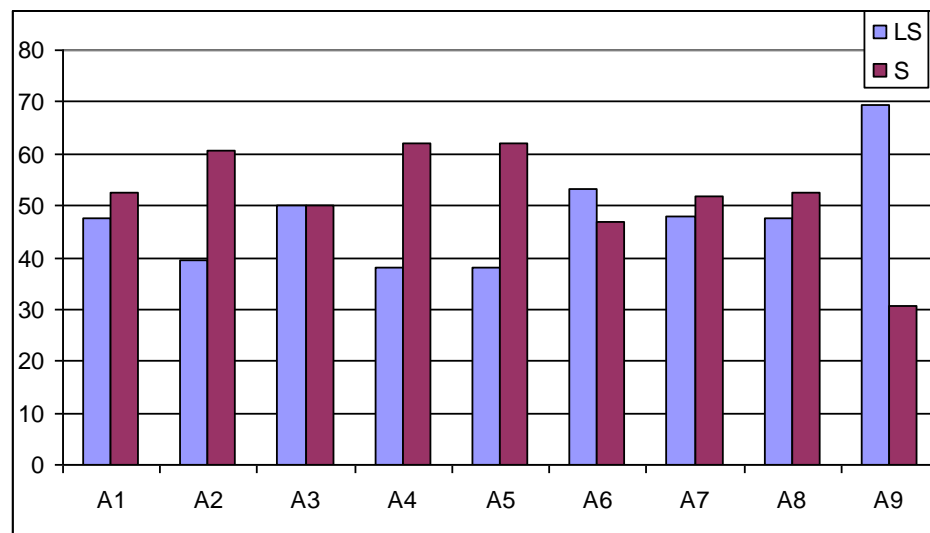
Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab mengapa sekolah dasar di Kota Bandung belum dapat memenuhi target SPM yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu, pada studi yang dilakukan oleh Triatna (2015, hlm. 13) pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai kapasitas manajemen sekolah, yaitu:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merasa berat untuk memenuhi berbagai kebijakan pemerintah, seperti pada perubahan kurikulum.

2. Pengembangan kapasitas sekolah dirasa sulit karena terbatasnya pendidik dan tenaga kependidikan dan fasilitas.
3. Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ideal namun pada praktiknya sulit untuk direalisasikan oleh sekolah.
4. Guru tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pembelajaran kepada siswa.

Permasalahan ini tentunya berdampak pada manajemen penyelenggaraan pendidikan dan yang nantinya akan berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Tinggi dan rendahnya mutu pendidikan akan berdampak pada pelayanan yang diberikan sekolah kepada para pelanggan pendidikan. Keberhasilan mutu pendidikan dapat dilihat dari puas atau tidaknya pelanggan terhadap jasa ataupun produk yang diberikan.

Berdasarkan data di atas, maka dampak dari rendahnya kapasitas manajemen sekolah akan berdampak pada kepuasan pelanggan pendidikan. Sebagaimana representasi kepuasan pelanggan terhadap kapasitas sekolah di Indonesia yang didasarkan pada data dari Bappenas (2009, hlm. 4) berikut ini:



**Gambar 1.1 Tingkat Kepuasan Orangtua terhadap Sembilan Atribut Pelayanan Pendidikan Dasar pada Jenjang SD (%)**

Sumber: Bappenas (2009, hlm. 4)

**Catatan:** LS= Kurang Puas; S= Puas

A1= Kualitas Proses Pembelajaran; A2= Kualitas Pengajaran; A3= Hasil dari Proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak; A4= Kondisi kenyamanan sekolah; A5= Menjaga disiplin dan keamanan di sekolah; A6= Keterlibatan orangtua; A7= Kualitas Fasilitas Fisik; A8= Kesiapan alih tahun pelajaran; A9= Ketersediaan Biaya Sekolah Anak.

Grafik di atas menunjukkan bagaimana kepuasan yang dirasakan oleh para orang tua dilihat dari sembilan atribut pendidikan. Hal tersebut merupakan dampak dari belum terpenuhinya kapasitas sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang belum memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Sehingga, dari kesembilan atribut tersebut secara nyata menunjukkan adanya ketidakpuasan orang tua yang bervariasi untuk masing-masing komponen di jenjang sekolah dasar. Ketidakpuasan yang terendah dicapai pada komponen A2 (kualitas pengajaran), A4 (kondisi kenyamanan sekolah), dan A5 (menjaga disiplin dan keamanan di sekolah).

Tinggi rendahnya kepuasan pelanggan terhadap pendidikan merupakan penilaian pelanggan terhadap layanan yang diberikan sekolah dan kondisi yang dimiliki sekolah. Menurut Triatna (2015, hlm. 11) bahwa ketidakpuasan pelanggan merupakan sebuah kondisi yang paling besar kemungkinan disebabkan karena kapasitas SDM sekolah tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas manajemen sekolah. Triatna (2014, hlm. 447) dalam hasil penelitiannya mengenai Studi Pengembangan Kapasitas Manajemen Untuk Meningkatkan Kinerja Sekolah mengemukakan empat faktor yang signifikan akan mempengaruhi pengembangan kapasitas manajemen, yaitu keteladanan kepemimpinan, kegiatan belajar bersama di antara pendidik dan tenaga kependidikan melalui praktik manajemen keseharian, pengembangan kreativitas dalam pemecahan masalah, dan penyediaan kondisi-kondisi yang mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang yang sehat. Faktor-faktor yang signifikan tersebut dikembangkan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah.

Menurut Mulyasa (2012, hlm. v), kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang harus bertanggungjawab terhadap maju mundurnya sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan, berkaitan dengan masalah manajemen maupun kemimpinan, agar dapat memajukan dan mengembangkan sekolahnya serta mampu melaksanakan berbagai program sekolah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba meneliti keterkaitan antara salah satu faktor yang menurut peneliti memiliki pengaruh terhadap kapasitas manajemen sekolah, yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian berjudul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah pada sekolah dasar negeri di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah kapasitas manajemen sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kapasitas manajemen sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kapasitas manajemen sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bandung.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui gambaran kapasitas manajemen sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kapasitas manajemen sekolah di sekolah dasar negeri di Kota Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat dari Segi Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan pengembangan, baik secara konseptual maupun empirik sesuai dengan disiplin ilmu Administrasi Pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan manajemen sekolah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembangan disiplin ilmu dan dapat menjawab persoalan kompleks yang berkenaan dengan masalah kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan kapasitas manajemen dasar negeri di Kota Bandung.

##### **2. Manfaat dari Segi Praktik**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam rangka memberikan suatu informasi mengenai bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam kapasitas manajemen sekolah pada sekolah dasar negeri di Kota Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam kapasitas manajemen sekolah pada sekolah dasar negeri di Kota Bandung.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bahan masukan bagi sekolah dasar di Kota Bandung agar lebih meningkatkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kapasitas manajemen sekolah.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika dari penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka berisikan mengenai teori-teori yang sedang dikaji untuk penelitian. Pada bab ini berfungsi untuk menguatkan penelitian yang dilakukan berisikan tentang teori mengenai kapasitas manajemen, pengembangan kapasitas manajemen, penelitian terdahulu, dan kajian teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka akan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. BAB III Metodologi Penelitian membahas lebih rinci mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang mencakup desain penelitian, partisipan, lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan berisikan mengenai temuan dari hasil penelitian yang mencakup analisis data penelitian serta pengolahan data menggunakan perhitungan statistik.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan berisikan implikasi serta rekomendasi untuk perbaikan penelitian selanjutnya.
6. Daftar Pustaka yang berisikan referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.